

Kohesi Voting Negara-Negara Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) dalam United Nations General Assembly (UNGA) 1997-2018

**Mohammad Daffa Izulhaq
Garin Vieri Safitra**

UPN “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) is an international organisation that was founded on the basis of common language and culture, which are Portuguese. Its members span across four continents and have very diverse socio-political and economic background. Some of them are developed European country of Portugal, big and promising country of Brazil, and small and newly formed country of Timor Leste. CPLP pledges to reach their general objectives, which are political and diplomatic consultation among member states, cooperation in all fields, and promotion of Portuguese language. With diverse backgrounds and seemingly optimistic objectives, one wonders how CPLP countries could develop uniform preference of foreign policy over its time of being. In this paper, the writers would like to know how united are these countries of CPLP in United Nations General Assembly (UNGA), through researching their voting cohesion. We start our research from 1997 – a year after CPLP was founded – and ended in 2018. From this research, we conclude that trend of voting cohesion of CPLP countries is increasing. We also find that the highest voting cohesion could be found in resolution regarding middle east issues and the lowest in the resolution regarding human rights issues.

Keywords: *CPLP, UNGA, Voting Cohesion*

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) adalah organisasi internasional yang didirikan atas dasar kesamaan bahasa dan budaya, yakni bahasa dan budaya Portugis. Anggota organisasi tersebut terpecah ke empat benua dan memiliki latar belakang sosio-politik dan ekonomi yang sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah Portugal yang merupakan negara maju Eropa, Brazil yang merupakan negara besar dan menjanjikan, hingga Timor Leste yang merupakan negara kecil dan baru. CPLP berjanji untuk menggapai tujuan-tujuan utama mereka, yaitu konsultasi politik dan diplomatik antar negara anggota; kerjasama di segala bidang; dan promosi bahasa Portugal. Dengan latar belakang yang berbeda dan tujuan yang tampak optimis ini, kita bertanya-tanya apakah negara-negara CPLP bisa mengembangkan preferensi kebijakan luar negeri menjadi seragam selama waktu keberadaannya. Dalam tulisan ini, penulis ingin tahu seberapa bersatu negara-negara CPLP dalam United Nations General Assembly (UNGA), dengan meneliti kohesi voting mereka. Kami memulai penelitian kami dari 1997 – setahun pasca CPLP didirikan – dan berakhir pada 2018. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa tren kohesi voting CPLP adalah meningkat. Kami juga menemukan bahwa kohesi voting tertinggi ada pada resolusi terkait isu Timur Tengah dan yang terendah ada pada resolusi terkait isu HAM.

Kata-Kata Kunci: *CPLP, Majelis Umum PBB, Kohesi Voting*

Latar Belakang

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) atau Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis adalah organisasi internasional yang keanggotaannya berdasarkan kesamaan bahasa, yakni bahasa Portugis. Berangkat dari kesamaan bahasa Portugis, negara-negara *Lusophone* (i.e. *portuguese speaking*) mendirikan CPLP dengan harapan meningkatkan kerjasama internasional dalam mempertahankan nilai dan kepentingan masing-masing berdasarkan demokrasi; promosi pembangunan; dan penciptaan lingkungan internasional yang lebih seimbang dan damai (CPLP 2020a). Diharapkan persamaan antar negara CPLP bisa menjembatani perbedaan mereka, seperti perbedaan latar belakang sosial, politik, dan ekonomi antar negara anggota CPLP terlalu besar untuk berusaha ditutupi atau disatukan oleh kesamaan bahasa. Misalnya kondisi Timor Leste yang baru saja merdeka kembali pada 2002 merupakan tantangan dalam proses *national building* (Sahin 2011), posisi Brazil sebagai negara besar secara ekonomi dan politik di Amerika Selatan (Anselmo, Tannús dan Pedrosa 2012), kondisi sosio-politik Guinea Bissau yang menciptakan tantangan tertentu terhadap demokratisasi di negara tersebut (Ture 2017), dan posisi unik Portugal sebagai negara termaju di organisasi tersebut (Anselmo, Tannús dan Pedrosa 2012).

Dengan latar belakang negara yang cukup beragam ini, apakah CPLP bisa memiliki kesamaan pandangan dalam kebijakan luar negeri?. Penghitungan kohesi voting dalam Majelis Umum PBB atau *United Nations General Assembly* (UNGA) adalah salah satu metode untuk mengetahui kesamaan pandangan atau preferensi kebijakan luar negeri. Metode ini digunakan untuk menilai kohesi voting negara-negara anggota suatu organisasi internasional berdasarkan pola voting mereka dalam UNGA. Beberapa organisasi regional seperti EU (Burmester dan Jankowski 2014), BRICS (Hooijmaaijer dan Keukeleir 2016), dan *Turkic Council* (Kaplan, Yuvacı dan Amanov 2015) pernah diteliti dengan metode ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan preferensi kebijakan luar negeri negara-negara anggota CPLP dari 1997 hingga 2018 yang tertuang dalam kohesi voting di UNGA. Apakah negara-negara anggota CPLP semakin seragam atau berbeda dalam voting mereka. Kami membatasi penelitian kami dari tahun 1997, yaitu setahun setelah CPLP pertama kali dibentuk hingga tahun 2018. Hasil dari penelitian kami adalah kohesi voting CPLP dari 1997 hingga 2018 secara tren adalah meningkat. Selain itu, CPLP menunjukkan kohesi voting tertinggi pada isu Timur Tengah dan terendah pada isu HAM.

CPLP dan Latar Belakang Negara-Negara Anggotanya

CPLP memiliki tiga tujuan utama, yaitu konsultasi politik dan diplomatik antar negara anggota terutama untuk memperkuat keberadaan di panggung politik internasional; kerjasama di segala bidang seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi, dan lainnya; dan pelaksanaan proyek dalam rangka promosi penggunaan bahasa Portugis (CPLP 2020b). Hal-hal ini adalah dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing negara CPLP yang secara lebih mendasar dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang ekonomi, politik, dan sosio-kultural.

Secara ekonomi, terdapat kesenjangan yang masif antar negara anggota CPLP. Portugal adalah satu-satunya negara maju dalam CPLP (United Nations 2014), dengan *Gross Domestic Product* (GDP) *Purchasing Power Parity* (PPP) per kapita 36.470 USD pada 2019 (The World Bank 2020a). Brazil yang walaupun masih berstatus sebagai negara *upper middle income* (United Nations 2014), pada 2019 negara tersebut memiliki GDP PPP sebesar 3,22 Triliun USD dan juga negara dengan ekonomi terbesar nomor 10 di dunia (The World Bank 2020b). Brazil juga memiliki kekuatan industri dan ekspor besar di bidang bahan pangan, otomotif, dan bahan tambang yang cukup besar (The Observatory of Economic Complexity 2020). Sementara itu, negara anggota lainnya merupakan negara berkembang dengan GDP PPP per kapita yang berkisar antara 1.300 USD dari Mozambique hingga 7.400

USD dari Angola pada 2019, dengan pengecualian Equatorial Guinea dengan 19.300 USD (The World Bank 2020c). Tidak ketinggalan pula negara-negara seperti Equatorial Guinea dan Angola yang terlepas statusnya sebagai negara berkembang, memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang cukup masif (Anselmo, Tannús dan Pedrosa 2012) (Harrison-Church et. al 2019).

Secara politik, sebagian negara anggota CPLP adalah negara post-kolonial – seperti Angola, Mozambique, dan Equatorial Guinea – yang memiliki fenomena politik yang sama dengan banyak negara post-kolonial lain di dunia, seperti masih lemahnya sistem demokrasi dan partisipasi politik yang masih terbatas (Anselmo, Tannús dan Pedrosa 2012, 95). Kontras perbedaannya dengan negara seperti Portugal yang dianggap sebagai sistem politik demokratis yang maju (The Economist Intelligence Unit 2020). Secara sosio-kultural terdapat perbedaan yang drastis antar negara anggota CPLP. Negara seperti Portugal memiliki penduduk yang cenderung homogen etnis dan budayanya (Fearon 2003). Sementara itu, negara seperti Brazil merupakan negara multi-ras yang disatukan dengan bahasa Portugis (IBGE 2011). Sementara itu, negara-negara seperti Mozambik dan Angola yang memiliki bahasa asli yang perannya dalam masyarakat setempat tidak kurang penting dari bahasa Portugis (CIA 2020).

Perbedaan latar belakang yang kontras dari negara-negara CPLP ini menyebabkan terdapat perbedaan posisi internasional. Sebagai contoh, Brazil dan secara ekonomi dan politik lebih dekat dan cenderung menghegemoni di kawasan Amerika Selatan (Anselmo, Tannús dan Pedrosa 2012). Sementara itu, negara-negara seperti Equatorial Guinea dan Guinea Bissau cenderung pragmatis dengan menjadi *Organisation internationale de la Francophonie* (OIF) sembari menjadi anggota CPLP (Francophonie 2020). Ditambah pula dengan keanggotaan Portugal dalam Uni Eropa yang menyebabkan negara tersebut lebih menyerupai negara-negara lain di Eropa dibandingkan negara-negara *lusophone* lainnya dalam hal sistem politik, ekonomi, dan sosial (Fernandes 2018).

Perbedaan latar belakang ini juga terwujud dalam prinsip-prinsip utama CPLP yang beberapa diantaranya juga termasuk prinsip non-intervensi serta penghormatan terhadap integritas teritorial dan identitas nasional (CPLP 2020b). Akumulasi dari perbedaan latar belakang negara-negara anggota CPLP akan menjadi tantangan bagi organisasi CPLP untuk menggapai dan melaksanakan konsultasi diplomatik dan politik, kerjasama internasional, dan promosi penggunaan bahasa Portugis. Salah satu tantangan tersebut muncul pada masa awal pembentukan CPLP. Menurut Torres and Ferreira (2001) hubungan perdagangan antar negara CPLP masih tinggi bilateralismenya dibandingkan multilateralismenya.

Bilateralisme ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota CPLP belum bisa untuk berhubungan secara multilateral pada awal terbentuknya CPLP. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh keberadaan CPLP yang pada saat itu masih baru, sehingga kurang maju secara institusi. Kurang seragamnya latar belakang ini juga bisa menjadi tantangan untuk CPLP sebagai organisasi internasional untuk menjadi suatu blok voting yang seragam dalam preferensi kebijakan luar negeri anggotanya. Namun, seiring waktu, apakah CPLP bisa menunjukkan tren positif dalam proses penyeragaman tersebut, terutama dalam hal kohesi voting negara-negara anggotanya pada UNGA?

UNGA dan Preferensi Kebijakan Luar Negeri

Keberadaan UNGA seringkali dijadikan alat untuk meneliti kohesi voting negara-negara anggota PBB (Lucas 2012) (Burmester dan Jankowski 2014) (Kaplan, Yuvacı dan Amanov 2015) (Hooijmaaijer dan Keukeleir 2016). Beberapa argumen utama untuk menjustifikasi metode ini adalah sebagai berikut. Pertama, semua negara anggota PBB direpresentasikan di UNGA dengan *voting power* yang setara, negara adidaya seperti Amerika Serikat dan negara

kecil seperti Sierra Leone memiliki suara yang sama kuatnya sehingga pengaruh negara adidaya di UNGA tidak terlalu besar – apabila dibandingkan Dewan Keamanan PBB yang memiliki sistem veto (Kaplan, Yuvacı dan Amanov 2015, 127). Selain itu, pola voting suatu negara di UNGA lebih mencirikan pola kebijakan luar negeri mereka, karena dalam metode ini lebih kecil peluangnya untuk terkena *outvoted* oleh negara-negara yang lebih besar dan maju, seperti di organisasi internasional lain yang menggunakan sistem *weighted voting* (e.g. IMF).

Kedua, peran utama UNGA yang berdasarkan *the Charter of United Nations* sebagai ruang diskusi berbagai macam isu internasional dari keamanan tradisional hingga sosio-budaya (United Nations 2020a). Sehingga dalam UNGA seluruh negara di dunia – baik negara besar maupun negara kecil – mengikuti proses diskusi terkait isu yang beragam, dari isu *high politics* seperti isu senjata nuklir hingga isu *low politics* seperti isu ketersediaan pangan (Kaplan, Yuvacı dan Amanov 2015, 127).

Ketiga, dalam proses voting di UNGA, negara-negara bisa saja menampakkan pola-pola tertentu dalam voting mereka, seperti membentuk blok voting yang berdasarkan faktor lain (Voeten 2000). Salah satu faktor tersebut adalah keanggotaan pada organisasi internasional lain. Banyak negara anggota PBB memiliki keanggotaan di organisasi internasional lain, seperti organisasi berbasis agama (e.g. Organisasi Konferensi Islam (OKI)), bahasa (e.g. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)), dan ekonomi (e.g. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)). Dengan demikian, para ilmuwan kerap kali meneliti korelasi antara keanggotaan negara-negara pada organisasi tersebut atau kepentingan negara-negara dalam organisasi tersebut dengan pola voting mereka pada UNGA.

Salah satu organisasi internasional yang paling sering diteliti menggunakan metode kohesi voting adalah *European Union* (EU). Jin dan Hosli (2013) meneliti dampak Perjanjian Lisbon terhadap kohesi voting EU. Burmester dan Janowski (2014) berpendapat bahwa kekuatan kohesi voting EU pada UNGA tidak terletak pada kohesivitas setiap voting, namun pada kohesivitas voting EU yang cukup erat walaupun pada UNGA terdapat ketidaksepahaman besar. Sementara itu, Lucasc (2012) mencoba menganalisis kohesi voting negara-negara EU dan Amerika Serikat dan berpendapat bahwa yang mempengaruhi hal tersebut adalah tingkat pentingnya isu tersebut dan jenis resolusi pada sisi AS serta durasi keanggotaan di EU dan *transaction cost* pada sisi EU.

Selain EU, banyak organisasi internasional lain yang diteliti kohesi voting anggotanya di UNGA. Kaplan, Yuvacı dan Amanov (2015) berpendapat bahwa kohesi voting Turkic Council tinggi pada isu Timur Tengah dan kolonialisme serta rendah pada isu senjata nuklir dan pembangunan. Hooijmaaijer dan Keukeleir (2016) berpendapat bahwa kohesi voting negara-negara BRICS – Brazil, Rusia, India, Tiongkok and Afrika Selatan – tidak meningkat secara signifikan sejak konsultasi *BRIC framework* pada 2006. Montenegro dan Mesquita (2017) melakukan analisis terhadap kohesi voting negara-negara anggota BRICS dengan negara-negara lain dalam region negara-negara BRICS. Dengan demikian, dapat diketahui apakah negara-negara BRICS menjadi pemimpin dalam *region* mereka masing-masing.

CPLP sebagai organisasi internasional yang keanggotaannya cukup beragam dari sudut pandang latar belakang sosio-politik, geografi, dan ekonomi, tentunya cukup menarik untuk diteliti apakah CPLP sebagai organisasi bisa membentuk suatu voting blok yang terdiri dari negara-negara anggotanya. Namun sayang sejauh ini belum ada analisis penggunaan metode kohesi voting untuk melihat kekompakan negara-negara CPLP dalam UNGA. Dengan demikian, kami mencoba untuk menerapkan metode yang sama seperti peneliti-peneliti lain – khususnya penelitian oleh Kaplan, Yuvacı dan Amanov (2015) – dalam meneliti CPLP.

Metodologi

Dalam tulisan ini, kami berusaha mencari kesamaan preferensi kebijakan luar negeri negara-negara anggota CPLP melalui kohesi voting mereka dalam UNGA. Kami membatasi penelitian kami dimulai dari setahun setelah CPLP dibentuk, yaitu 1997 hingga 2018. Mengingat beberapa negara masuk menjadi anggota CPLP tidak pada 1997, seperti Timor Leste yang menjadi anggota CPLP pada 2002 dan Equatorial Guinea pada 2014. Kepada dua negara tersebut, kami baru menghitung voting negara tersebut sebagai anggota CPLP setahun setelah mereka masuk menjadi anggota CPLP – 2003 untuk Timor Leste dan 2015 untuk Equatorial Guinea. Kami juga mengakhiri penelitian kami di tahun 2018 karena sumber data penelitian kami berakhir pada tahun tersebut.

Kami juga membagi kohesi voting pada CPLP dan UNGA berdasarkan tahun, bukan berdasarkan *session* pada UNGA, mengingat pembahasan satu *session* di UNGA umumnya melewati batas Januari ke Desember, seperti UNGA 73rd Session yang berlangsung dari September 2018 hingga September 2019 (United Nations 2020b). Kami menggunakan *research questions* yang sama seperti Kaplan, Yuvacı, & Amanov (2015) dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana kohesi voting negara-negara CPLP dibandingkan kohesi voting UNGA pada umumnya?, (2) bagaimana kohesi voting negara-negara CPLP pada isu-isu tertentu pada UNGA?, dan (3) pada isu apa kohesi voting tertinggi dan terendah negara-negara CPLP?

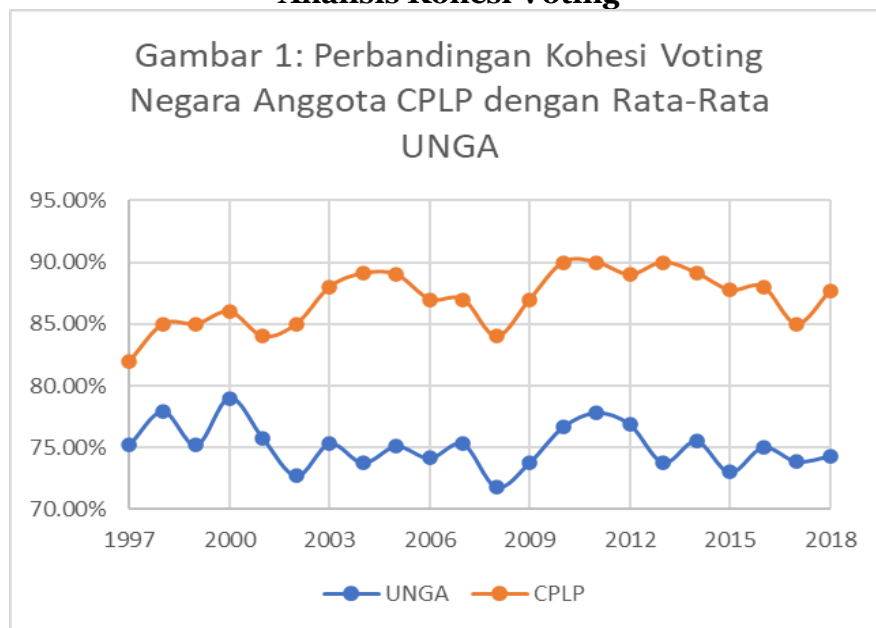
Dalam rangka klasifikasi isu, kami menggunakan klasifikasi yang telah diberikan oleh Bailey, Strezhnev, dan Voeten (2009) pada *United Nations General Assembly Voting Data* yang juga menjadi sumber data kami. Isu-isu tersebut adalah isu Timur Tengah, keamanan (gabungan dari isu kontrol senjata dan nuklir), HAM, kolonialisme, dan pembangunan ekonomi. Kami berharap agar bisa mengetahui perkembangan pola kohesi voting negara-negara anggota CPLP dibandingkan kohesi voting rata-rata pada UNGA, serta hal apa saja yang mungkin mempengaruhi perubahan kohesi voting CPLP. Selain itu, kami menggunakan metode penghitungan kohesi voting pada UNGA yang berdasarkan rumus yang dikemukakan pada Hosli et al. (2010) seperti yang dikutip oleh Kaplan, Yuvacı, & Amanov (2015), yaitu sebagai berikut

$$C = |AVx - 0,5| \times 2 \times 100$$

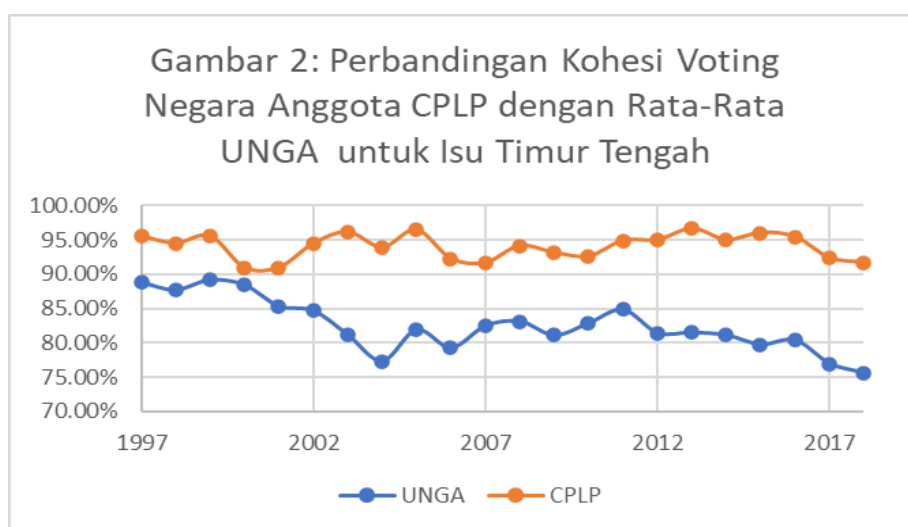
C adalah nilai kohesi dan AVx nilai rata-rata voting di satu resolusi. Mengingat dalam sistem voting UNGA terdapat 4 jenis - yaitu YES, NO, ABSTAIN, dan ABSENT (tidak mengikuti voting) dalam perhitungan. YES dianggap sebagai 1, NO dianggap sebagai 0, dan ABSTAIN dianggap sebagai 0,5, dan ABSENT dianggap tidak dimasukkan ke penghitungan. Kami setuju dengan Luif (2003) bahwa ABSTAIN adalah jalan tengah antara YES dan NO, dan bisa dinilai sebagai 0,5. Sementara itu untuk posisi ABSENT, kami setuju dengan pendapat Panke (2013) partisipasi negara-negara dalam UNGA sangat dipengaruhi oleh kapabilitas mereka, sebagian negara memiliki kapabilitas yang cukup dan sebagian tidak.

Hal inilah yang menurut Burmester dan Jankowski (2014, 8) sangat terlihat dampaknya pada negara-negara berkembang. CPLP sebagai organisasi internasional yang mayoritas dari anggotanya adalah negara berkembang, tidak terhindar dari permasalahan ini, terbukti dari keberadaan beberapa negara berkembang CPLP yang sering tidak mengikuti proses voting di UNGA. Selain itu masih dalam sumber yang sama, ABSENT dalam voting juga bisa disebabkan oleh alasan politik yang membuat delegasi tidak menekan tombol, seperti perubahan pemerintahan yang menyebabkan negara untuk sementara tidak memiliki delegasi (Voeten 2013, 55).

Analisis Kohesi Voting



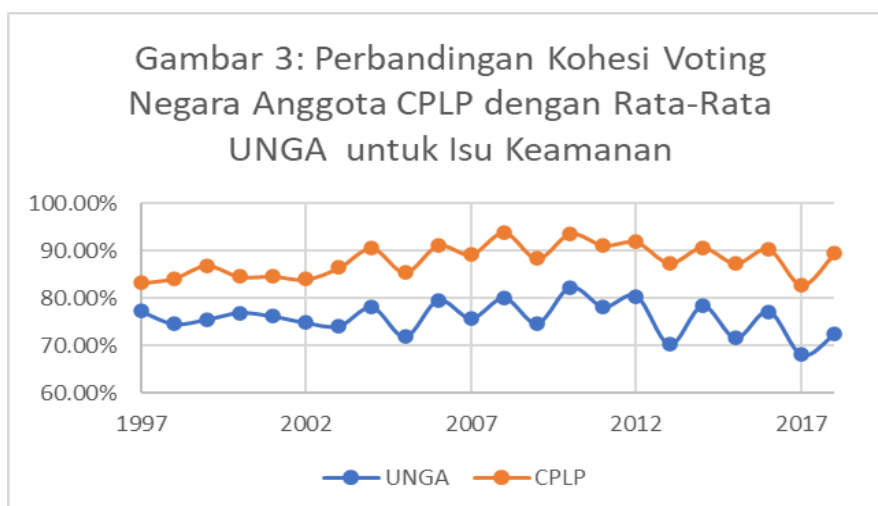
Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa kohesi voting negara-negara anggota CPLP selalu berada di atas rata-rata kohesi voting UNGA. Selama periode 1997 hingga 2018, kohesi voting rata-rata negara-negara CPLP adalah 87%, sementara itu rata-rata UNGA adalah 75,08%. Dalam aspek tren, kohesi voting negara-negara anggota CPLP menunjukkan perkembangan yang progresif, yaitu 82% pada 1997 dan 88% pada 2018. Berbeda dengan rata-rata kohesi voting UNGA yang secara tren menunjukkan penurunan, yaitu 75% pada 1997 dan 74% pada 2018. Selain itu, masuknya anggota baru CPLP – Timor Leste pada 2002 dan Equatorial Guinea pada 2014 – kurang memiliki pengaruh yang absolut naik atau turun terhadap kohesi voting CPLP. Tren progresif tersebut menunjukkan bahwa negara-negara CPLP *in a way or another* membentuk suatu blok voting khusus seperti negara-negara anggota EU, BRICS, dan Turkic Council. Setelah ini adalah analisis kohesi voting yang terbagi-bagi dalam beberapa isu, yaitu isu Timur Tengah, keamanan, HAM, kolonialisme, dan pembangunan ekonomi.



Isu Timur Tengah yang dirujuk oleh Gambar 2, mayoritas terkait dengan permasalahan Israel-Palestina. Disini, walaupun tren kohesi voting negara-negara CPLP menurun – 96% pada 1997 menjadi 92% pada 2018. Namun turunannya secara absolut tidak separah UNGA

– 89% pada 1997 menjadi 75,6% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 82,5%. Bahkan isu ini pula kohesi voting rata-rata negara-negara CPLP adalah yang tertinggi dibandingkan isu lain, yaitu 94%. Hal ini bisa disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas negara anggota CPLP adalah negara Asia dan Afrika post-kolonial yang masih memandang isu tersebut dari kacamata quasi-kolonialisme, bahkan CPLP sendiri dianggap beberapa pihak sebagai proyek neo-kolonialisme Portugal (de Freixo 2007, 41-42). Pandangan ini bisa saja menyebabkan Palestina dalam konflik tersebut sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan Israel, sehingga mereka lebih simpati kepada Palestina. Sementara itu untuk negara Portugal, mengingat integrasi Portugal ke EU lebih utama dan dalam daripada kepada CPLP (Fernandes 2018), bisa disimpulkan bahwa Portugal cenderung mengambil posisi seperti negara EU lainnya, yaitu cenderung mendukung Palestina dalam PBB (Persson 2015, 89). Terlebih lagi pada isu yang berkaitan dengan perbatasan Israel Palestina, pengungsi Palestina, Yerusalem, dan pemukiman Israel di Tepi Barat. Tema-tema ini umumnya mendominasi resolusi UNGA terkait masalah Israel-Palestina.

Tingginya kohesivitas voting negara-negara CPLP salah satunya dicontohkan pada *United Nations General Assembly resolution 67/19* tahun 2012. Resolusi ini berisi tentang peningkatan status Palestina di PBB menjadi *non member observer*. Dalam resolusi ini, semua negara anggota CPLP mendukung resolusi tersebut, terkecuali Equatorial Guinea yang tidak mengikuti voting (United Nations 2012). Selain itu, dalam hal preferensi kebijakan luar negeri secara umum, mayoritas negara-negara CPLP mengakui Israel dan Palestina sebagai negara, terkecuali Portugal yang hanya mengakui Israel.

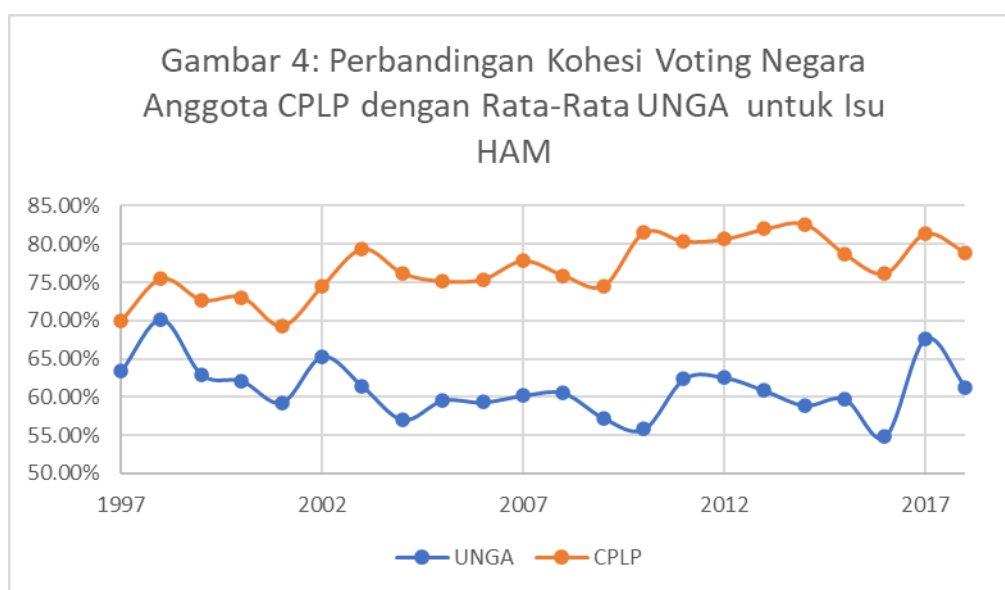


Isu keamanan yang dirujuk pada Gambar 3 ini berkaitan dengan senjata, bahan nuklir, dan regulasi senjata. Tren kohesi voting negara-negara CPLP pada isu ini mengalami kenaikan yaitu 83% pada 1997 menjadi 90% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 88%. Sementara itu untuk kohesi voting rata-rata UNGA, trennya mengalami penurunan dari 77,3% pada 1997 menjadi 72,43% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 75,84%. Secara jelas, voting negara-negara CPLP pada isu ini lebih kohesif dibandingkan UNGA pada umumnya, dipengaruhi oleh cukup seragamnya pandangan negara-negara CPLP terkait nuklir. Hal ini terbukti dengan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968* yang mengatur tentang pencegahan persebaran senjata nuklir serta mendukung penggunaan teknologi nuklir untuk kepentingan kedamaian. Semua negara anggota CPLP menjadi *parties* dalam perjanjian ini (UNODA 2020).

Selain itu, realitas bahwa mayoritas negara CPLP adalah negara berkembang turut mempengaruhi persamaan pandangan terhadap senjata nuklir. Menurut Goldemberg (2009) negara-negara berkembang seringkali tidak menempatkan pengembangan teknologi

nuklir pada prioritas mereka karena keterbatasan sumber daya dan adanya prioritas lain yang lebih penting seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan. Kondisi ini bisa menyebabkan negara-negara CPLP - yang mayoritas terdiri dari negara berkembang - cenderung seragam dalam memiliki pandangan dan kepentingan untuk mengembangkan teknologi nuklir hanya untuk kepentingan non-militer.

Namun, dalam negara CPLP terdapat dua negara yang cukup mencolok di isu ini, yaitu Brazil, Portugal, dan Timor Leste. Brazil adalah satu-satunya negara CPLP yang pernah mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan keamanan pada 1950-an hingga 1970-an. Namun dewasa ini, Brazil telah berhenti mengembangkan senjata nuklir (Spektor 2016). Di sisi lain, Portugal adalah satu-satunya negara CPLP yang negaranya tidak termasuk dalam area *Nuclear Weapon Free Zones* (Arms Control 2017). Posisi Portugal yang unik ini bisa disebabkan oleh keanggotaan Portugal dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang merupakan organisasi internasional di bidang keamanan yang juga diberanggotakan *nuclear weapon countries* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara itu untuk Timor Leste, negara ini tidak berada pada area *Nuclear Weapon Free Zones* lebih karena saat Perjanjian Bangkok 1995 (Perjanjian yang mengesahkan negara-negara Asia Tenggara ke dalam *Nuclear Weapon Free Zone*), Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia. Dalam isu ini – spesifiknya senjata nuklir – Timor Leste berada dalam posisi yang cukup anti terhadap senjata nuklir dan pemusnah massal lainnya (Government of Timor Leste 2017)

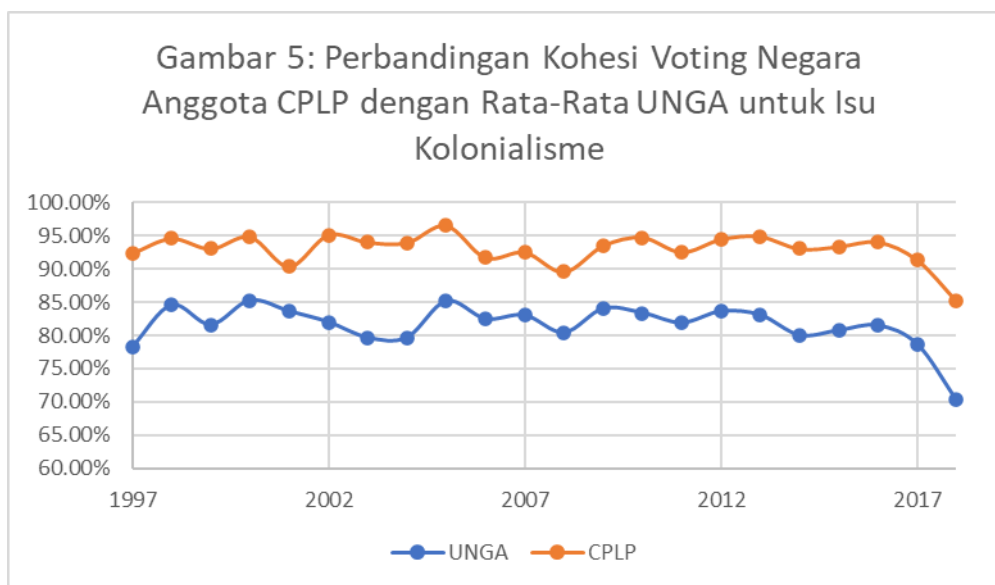


Berdasarkan Gambar 4, tren kohesi voting negara-negara CPLP pada isu HAM mengalami kenaikan yaitu 70% pada 1997 menjadi 79% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 77%. Dalam isu ini, negara-negara CPLP memiliki kohesi voting terendah dibandingkan pada isu lain. Sementara itu, kohesi voting UNGA, trennya mengalami penurunan dari 63,37% pada 1997 menjadi 61,30% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 61%. Salah satu penyebab utama kohesi voting negara-negara CPLP yang selalu lebih tinggi daripada rata-rata UNGA adalah keanggotaan CPLP yang didominasi oleh negara berkembang – Portugal hanyalah negara CPLP yang umumnya dikategorikan sebagai negara maju (United Nations 2014). Perbedaan antara negara berkembang dan maju dalam isu HAM umumnya tampak jelas kepada dua isu, yaitu isu tentang kondisi HAM yang spesifik di negara tertentu dan deklarasi global melawan suatu isu HAM universal.

Dalam isu pertama, resolusi umumnya berkaitan dengan kecaman terkait kondisi HAM di suatu negara, misalnya *United Nations General Assembly resolution 59/205* terkait kondisi

HAM di Iran dan *United Nations General Assembly resolution 59/206* terkait kondisi HAM di Turkmenistan. Pada dua resolusi ini, tampak perbedaan antara negara berkembang dan negara maju dalam hal suara walaupun kurang jelas (e.g. negara berkembang seperti Timor Leste memilih suara seperti negara maju pada umumnya). Negara berkembang pada umumnya memilih “NO”, “ABSTAIN”, atau tidak hadir sama sekali dalam proses voting, sementara itu negara-negara maju pada umumnya memilih “YES” (*United Nations 2004a*) (*United Nations 2004b*). Secara tidak langsung, menandakan bahwa mayoritas negara maju mengutuk kondisi HAM yang buruk di suatu negara, sementara itu negara berkembang memilih tidak berpendapat atau tidak setuju dengan ujaran kutukan dari negara maju. Pola voting ini berkaitan dengan ketidaksukaan negara-negara berkembang – khususnya anggota G77 – terhadap intervensi humaniter yang umumnya dilakukan oleh negara adidaya maju yang awalnya diawali dari kutukan kondisi HAM yang buruk di suatu negara (*G77.org 2000*)

Pada isu kedua, resolusi terkait dengan deklarasi terhadap suatu isu HAM universal namun terdapat perbedaan pandangan antara negara maju dan berkembang. Salah satunya adalah *United Nations General Assembly resolution 62/220* terkait eliminasi rasisme, inteloransi, dan xenophobia. Dalam resolusi ini terdapat perbedaan yang cukup jelas antara negara maju dan berkembang, banyak negara barat dengan latar belakang ekonomi yang cukup beragam seperti Amerika Serikat, Portugal, Bulgaria dan Jerman memilih “NO” dalam voting tersebut. Sementara itu, negara-negara non barat – seperti negara-negara CPLP selain Portugal – umumnya memilih “YES” atau tidak menghadiri proses voting (*United Nations 2020a*). Dalam voting isu serupa (e.g. *United Nations General Assembly Resolution 74/136* tentang melawan glorifikasi Nazisme dan Neo-Nazisme) Amerika Serikat yang memilih “NO” menggunakan argumen bahwa cakupan resolusi tersebut terlalu sempit sehingga cenderung membatasi kebebasan berpendapat (*Government of the United States 2019*). Hal ini cukup masuk akal karena masyarakat barat – spesifiknya Amerika Serikat dan Eropa Barat – lebih mengedepankan pemenuhan hak individu, termasuk kebebasan berpendapat, dibandingkan negara-negara Afrika dan Asia Timur yang lebih fokus kepada pemenuhan kewajiban pada keluarga dan masyarakat (*Alvarez dan Kimmelmeier 2017, 711*).

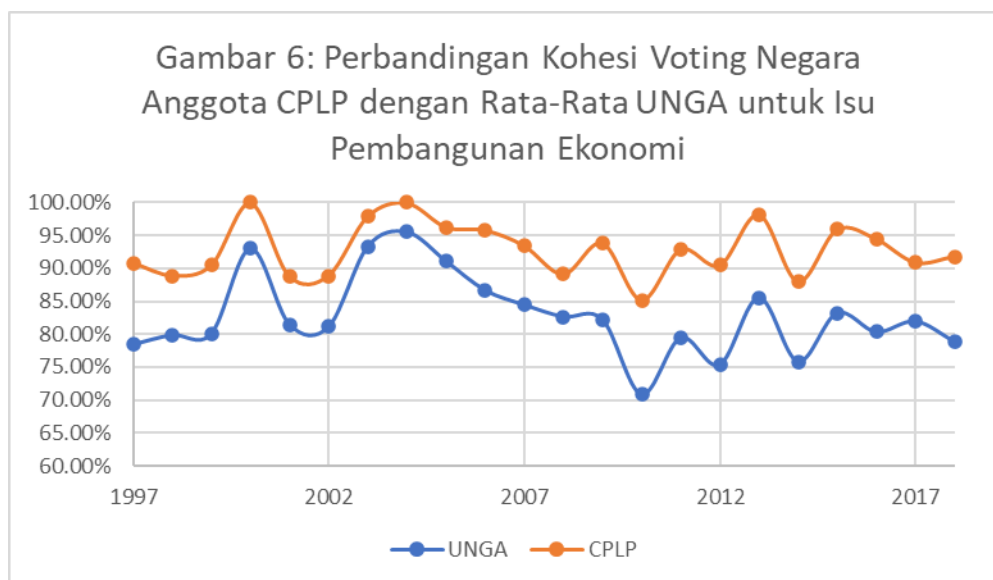


Berdasarkan Gambar 5, tren kohesi voting negara-negara CPLP pada isu kolonialisme mengalami penurunan yaitu 92% pada 1997 menjadi 85% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 93%. Sementara itu, kohesi voting UNGA, trennya mengalami penurunan dari 78,27% pada 1997 menjadi 70,34% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 81,52%. Keseragaman pada CPLP bisa dijelaskan oleh fakta bahwa mayoritas negara anggota CPLP – kecuali Portugal – adalah negara bekas koloni, spesifiknya negara bekas koloni Portugal. Berbeda dengan latar belakang negara-negara UNGA yang lebih beragam baik dalam hal

perbedaan negara bekas koloni dan apakah negara tersebut mantan *colonial power* atau tidak.

Beberapa isu yang sering dikategorikan sebagai isu kolonialisme adalah konflik Palestina-Israel, *rights of self determination*, dan dukungan terhadap dekolonisasi. Dalam isu konflik Israel-Palestina, negara-negara CPLP umumnya cukup bersatu dalam tidak mendukung posisi Israel, walau negara-negara seperti Portugal, Brazil, dan Timor Leste dibandingkan negara CPLP lain lebih sering mengambil posisi “ABSTAIN”.

Sementara itu dalam isu *rights of self determination* dan pemberian kemerdekaan kepada warga koloni, Portugal mengambil posisi yang paling berbeda (posisi “ABSTAIN”) dibandingkan negara-negara lainnya yang umumnya selalu mendukung resolusi di isu tersebut. Posisi Portugal yang berbeda ini menyerupai posisi negara-negara Barat lainnya – terutama negara mantan *colonial power* lainnya seperti Inggris Raya, Prancis, dan Belgia - yang juga menyatakan “ABSTAIN”, contohnya pada *United Nations General Assembly Resolution 65/110* tentang *Report of the Special Political and Decolonization Committee* dalam *Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* (United Nations 2010). Kecenderungan ini mungkin disebabkan oleh integrasi Portugal pada EU yang lebih tinggi dibandingkan CPLP (Fernandes 2018) dan sejarah Portugal sebagai mantan *colonial power*. Berbeda dengan negara-negara CPLP lain yang justru mantan negara koloni dan bukan anggota EU.



Berdasarkan Gambar 6, tren kohesi voting negara-negara CPLP pada isu pembangunan ekonomi mengalami peningkatan yaitu 91% pada 1997 menjadi 92% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 93%. Sementara itu, kohesi voting rata-rata UNGA, trennya mengalami peningkatan dari 78,44% pada 1997 menjadi 78,90% pada 2018, dengan rata-rata sebesar 82,8%. Pada tahun 2000 dan 2004 negara-negara CPLP mengalami 100% kohesi voting yang artinya semua negara CPLP yang mengikuti voting di UNGA memiliki suara yang sama.

Tingginya kohesi voting CPLP dibandingkan UNGA dalam isu ekonomi bukanlah hal yang mengejutkan karena hampir semua negara CPLP adalah negara berkembang, spesifiknya negara *middle-income* yang masih kekurangan institusi untuk melakukan pembangunan ekonomi. Sementara itu di UNGA, presentasi negara maju pada keanggotaan organisasi tersebut lebih banyak daripada di CPLP. Terdapat 36 *advanced economies* dan 157 *non advanced economies* di UNGA, sementara itu terdapat 1 *advanced economy* dan 8 *non advanced economies* di CPLP (United Nations 2014).

Dua negara anggota CPLP yang tidak termasuk ke dalam kategori *lower* dan *lower middle income* adalah Portugal dan Brazil. Portugal adalah negara *high income* (The World Bank 2020d) dan anggota OECD sekaligus EU, sehingga masuk akal apabila negara tersebut mengambil posisi dalam isu ekonomi jauh lebih menyerupai negara-negara maju dari EU dibandingkan negara-negara CPLP pada umumnya. Sementara itu, Brazil adalah negara *upper middle income* (The World Bank 2020d) dan dalam mengambil posisi di isu ekonomi berada di antara negara-negara CPLP pada umumnya dan Portugal.

Kesimpulan

Penelitian ini berpendapat bahwa kohesi voting CPLP sejak 1997 hingga 2018 mengalami tren yang positif dibandingkan UNGA, meskipun terdapat masuknya negara-negara anggota baru seperti Timor Leste dan Equatorial Guinea yang bisa saja berpeluang menurunkan kohesi voting CPLP. Negara-negara CPLP mengalami tren yang meningkat pada isu keamanan, HAM, dan pembangunan ekonomi, dan mengalami penurunan pada isu Timur Tengah dan kolonialisme. Kohesi voting tertinggi tampak pada isu Timur Tengah sementara yang terendah tampak pada isu HAM. Mengingat fakta bahwa negara-negara anggota CPLP sangat beragam latar belakang sosio-politik dan ekonominya, sehingga berpengaruh kepada perbedaan preferensi kebijakan luar negeri, maka tampak cukup jelas pada kohesi voting negara-negara anggota organisasi tersebut. Pada akhirnya, negara-negara organisasi telah bergerak secara progresif dalam hal menyeragamkan preferensi kebijakan luar negeri mereka, apabila dilihat dari sudut pandang kohesi voting pada UNGA.

Referensi

Alvarez, Mauricio J., dan Markus Kemmelmeier. 2017. "Free Speech as a Cultural Value in the United States." *Journal of Social and Political Psychology* 5 (2): 707–735. doi:10.5964/jpspp.v5i2.590.

Anselmo, Rita de Cassia Martins de Souza, Thaís Tannús, dan António de Sousa Pedrosa. 2012. "A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: desafios e perspectivas." *Aurora Geography Journal* 81-99.

Arms Control. 2017. *Nuclear-Weapon-Free Zones (NWFZ) At a Glance*. Juli. [https://www.armscontrol.org/factsheets/nwzf#:~:text=A%20nuclear%2Dweapon%2Dfree%20zone%20\(NWFZ\)%20is%20a,spanning%20the%20entire%20Southern%20Hemisphere](https://www.armscontrol.org/factsheets/nwzf#:~:text=A%20nuclear%2Dweapon%2Dfree%20zone%20(NWFZ)%20is%20a,spanning%20the%20entire%20Southern%20Hemisphere).

Burmester, Nicolas, dan Michael Jankowski. 2014. "The EU in the United Nations General Assembly A Comparative Perspective." *4th European Union in International Affairs Conference, May 22nd-May 24th, Brussels, Belgium*. Brussels. 1-26.

CIA. 2020. *FIELD LISTING :: LANGUAGES*. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/402.html>.

CPLP. 2020a. *HISTÓRICO - COMO SURTIU?* Diakses Mei 26, 2020. <https://www.cplp.org/id-2752.aspx>.

—. 2020b. *OBJECTIVOS*. Diakses Oktober 20, 2020. <https://www.cplp.org/id-2763.aspx>.

de Castro, Paulo Canelas. 1998. "The Community of the Portuguese Speaking Countries (1) Subsidies for the Definition of the Identity of a Novel International Organization." *Verfassung und Recht in Übersee* 31 (2): 122-150.

de Freixo, Adriano. 2007. “*Minha Pátria é a Língua Portuguesa*”: *A Construção da Idéia da Lusofonia em Portugal*. Doctoral Thesis, Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ .

Fearon, James D. 2003. “Ethnic and Cultural Diversity by Country.” *Journal of Economic Growth* 8 (2): 195-222.

Fernandes, João Luís J. 2018. “Portugal between Lusophony, the European Union and the rest of the world: Strategic challenges and multiterritoriality in the 21st century.” *Méditerranée: Revue géographique des pays méditerranéens* (130).

Francophonie. 2020. *88 Etats et gouvernements*. <https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125>.

G77.org. 2000. *GROUP OF 77 SOUTH SUMMIT: DECLARATION OF THE SOUTH SUMMIT*. April. http://www.g77.org/summit/Declaration_G77Summit.htm.

Goldemberg, José. 2009. «Nuclear energy in developing countries.» *Dædalus* I: 71-81.

Government of the United States. 2019. *Explanation of Vote by the United States on the “Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices...” Resolution*. Diakses Oktober 24, 2020. <https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-by-the-united-states-on-the-combating-glorification-of-nazism-neo-nazism-and-other-practices-resolution/>.

Government of Timor Leste. 2017. *Timor-Leste votes at UN to endorse treaty prohibiting nuclear weapons*. 11 Juli. Accès le Oktober 24, 2020. <http://timor-leste.gov.tl/?p=18374&lang=en#:~:text=Timor%2DLeste%20votes%20at%20UN%20to%20endorse%20treaty%20prohibiting%20nuclear%20weapons,-Download%20Print&text=On%20the%207th%20of,the%20prohibition%20of%20nuclear%20weapons>.

Harrison-Church et. al, Ronald James. 2019. *Equatorial Guinea*. 06 September. Accès le October 24, 2020. <https://www.britannica.com/place/Equatorial-Guinea>.

Hooijmaaijer, Bas, dan Stephan Keukeleir. 2016. “Voting Cohesion of the BRICS Countries in the UN General Assembly, 2006–2014: A BRICS Too Far?” *Global Governance* (22): 389–407.

Hosli, Madeleine O., Evelyn van Kampen, Frits Meijerink, et Katherine Tennis. 2010. «Voting Cohesion in the United Nations General Assembly: The Case of the European Union.» *the ECPR Fifth PanEuropean Conference*. Porto.

IBGE. 2011. *Censo Demográfico 2010: Características da população e dos domicílios* . Demographics Census, Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Jin, Xi, et Madeleine O. Hosli. 2013. «Pre- and Post-Lisbon: European Union Voting in the United Nations General Assembly.» *West European Politics* 36: 1274-1291.

Kaplan, Muhittin, Abdullah Yuvacı, dan Shatlyk Amanov. 2015. “One Nation, Many Voices? External Cohesion of the Turkic Council States in the United Nations General Assembly, 1993-2011.” *Bilig - Turk Dunyası Sosyal Bilimler Dergisi* 125-150.

Lucas, Kirsten. 2012. “1 + 1 = 3? EU-US Voting Cohesion in the United Nations General Assembly.” *College of Europe*. Juli. https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-paper/edp_7_2012_lucas.pdf?download=1.

Luif, Paul. 2003. *EU cohesion in the UN General Assembly*. Occasional Papers, Paris: Institute for Security Studies, 1-75.

Montenegro, Renan Holanda, dan Rafael Mesquita. 2017. "Leaders or Loners? How Do the BRICS Countries and their Regions Vote in the UN General Assembly." *Brazilian Political Science Review* 11 (2): 1-32.

Panke, Diana. 2013. "Getting Ready to Negotiate in International Organizations On the Importance of the Domestic Construction of National Positions." *Journal of International Organization Studies* 4 (2): 25-38.

Persson, Anders. 2015. *The EU and the Israeli–Palestinian Conflict 1971–2013: In Pursuit of a Just Peace*. London: Lexington Books.

Portal Diplomático. 2020. *Community of Portuguese Speaking Countries*. Diakses September 29, 2020. <https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/en/foreign-policy/community-of-portuguese-speaking-countries>.

Sahin, Selver B. 2011. "Building the nation in Timor-Leste and its implications for the country's democratic development." *Australian Journal of International Affairs* 65 (2): 220-242.

Sanches, Edalina Rodrigues. 2014. "The community of Portuguese Language Speaking Countries: The role of language in a globalizing world." *Atlantic Future Workshop*. Pretoria: University of Pretoria. 1-23.

Spektor, Matias. 2016. "The evolution of Brazil's nuclear intentions." *The Nonproliferation Review* 23: 635-652. doi:10.1080/10736700.2017.1345518.

The Economist Intelligence Unit. 2020. *Democracy Index 2019: A year of democratic setbacks and popular protest*. London: The Economist Intelligence Unit.

The Observatory of Economic Complexity. 2020. *Brazil*. Diakses September 29, 2020. <https://oec.world/en/profile/country/bra>.

The World Bank. 2020c. *GDP per capita, PPP (current international \$) - Mozambique, Angola*. Diakses Oktober 24, 2020. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=MZ-AO-CV-GW-TL-ST-GQ>.

—. 2020a. *GDP per capita, PPP (current international \$) - Portugal*. Diakses September 29, 2020. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=PT>.

—. 2020b. "The World Bank." *Gross domestic product 2019, PPP*. 1 July. https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf.

—. 2020d. *World Bank Country and Lending Groups*. <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>.

Torres, Adelino, dan Manuel Ennes Ferreira. 2001. "A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no contexto da globalização: problemas e perspectivas." Dalam *Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Cooperação*, disunting oleh Adriano Moreira, 23-119. Coimbra: Almedina.

Ture, Iaia. 2017. "The Challenges of Democratization and Good Governance in Guinea-Bissau." *Journal of Public Administration and Governance* 7 (2): 130-143.

United Nations. 2020a. *Charter of the United Nations Chapter IV: THE GENERAL ASSEMBLY*. Diakses September 29, 2020. <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iv/index.html>.

- . 2014. "Country classification." *United Nations*. 15 January. https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf.
- . 2020a. *Global efforts for the total elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action*. Diakses Oktober 24, 2020. <https://digitallibrary.un.org/record/615163?ln=en>.
- . 2020b. *Resolutions of the 73rd session*. 24 Agustus. <https://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml>.
- . 2004a. *Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran : resolution / adopted by the General Assembly*. Diakses Oktober 24, 2020. <https://digitallibrary.un.org/record/537728?ln=en>.
- . 2004b. *Situation of human rights in Turkmenistan : resolution / adopted by the General Assembly*. Diakses Oktober 24, 2020. <https://digitallibrary.un.org/record/537730?ln=en>.
- . 2012. *Status of Palestine in the United Nations : resolution / adopted by the General Assembly*. <https://digitallibrary.un.org/record/738624?ln=en>.
- . 2010. "United Nations General Assembly: Sixty-fifth session." *United Nations*. Diakses Oktober 1, 2020. <https://undocs.org/en/A/65/PV.62>.
- UNODA. 2020. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt>.
- Voeten, Erik. 2000. «Clashes in the Assembly.» *International Organization* 54 (2): 185-215.
- Voeten, Erik. 2013. "Data and analyses of voting in the United Nations General Assembly." Dalam *Routledge Handbook of International Organization*, disunting oleh Bob Reinalda, 54-66. New York: Routledge.
- Voeten, Erik, Anton Strezhnev, dan Michael Bailey. 2009. "United Nations General Assembly Voting Data." Harvard Dataverse. Diakses Mei 12, 2020. doi:10.7910/DVN/LEJUQZ.